

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis yang telah diuraikan pada penjelasan di bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan pada pengujian variabel independen (belanja bantuan sosial, belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi) terhadap variabel dependen (kemiskinan), selama jangka waktu 15 tahun dari tahun 2010 – 2024. Setelah dilakukan analisis statistic menggunakan EvIEWS, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Belanja Bantuan Sosial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Artinya semakin besar Belanja Bantuan Sosial yang dikeluarkan akan menurunkan tingkat kemiskinan. Dengan demikian upaya pemerintah dengan memberi bantuan sosial terbukti efektif dalam menurunkan kemiskinan secara langsung.
2. Belanja Modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Artinya belanja modal tidak memberikan dampak langsung terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Hal ini bisa didasarkan pada belanja modal yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur memiliki efektivitas yang dirasakan dalam jangka panjang, akibatnya Belanja Modal tidak memberi dampak langsung penurunan kemiskinan dalam jangka pendek. Dengan demikian pemerintah perlu untuk

mengoptimalkan pengelolaan dan penyaluran pembangunan untuk langsung berdampak pada masyarakat miskin.

3. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dan belum dirasakan oleh seluruh penduduk miskin. Hasil ini dapat menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Kupang belum inklusif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, yang dapat dilihat dari kurangnya lapangan pekerjaan, akses Pendidikan dan Kesehatan, serta kesenjangan ekonomi yang dirasakan oleh lapisan masyarakat tertentu.

6.2 Saran

1. Program bantuan sosial yang dijalankan pemerintah saat ini sudah banyak membantu masyarakat miskin, namun pemerintah perlu meningkatkan investasi pada sumber daya manusia melalui program pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan kerja masyarakat. Mendorong kewirausahaan dengan memberikan bantuan berupa modal maupun barang ataupun pelatihan bagi masyarakat untuk memulai usaha kecil, bantuan yang diberikan tidak hanya berupa uang namun menyediakan bantuan pangan yang terjangkau dan berkualitas untuk memastikan kebutuhan gizi terpenuhi. Memperkuat sistem kesehatan dengan menyediakan layanan kesehatan gratis atau subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Melakukan monitoring dan evaluasi

secara berkala untuk memastikan program bantuan sosial berjalan efektif dan tepat sasaran.

2. Optimalisasi alokasi belanja modal untuk proyek padat karya tindakan konkret Prioritaskan proyek infrastruktur (jalan, irigasi, pasar desa) yang melibatkan tenaga kerja lokal, terutama di wilayah dengan angka kemiskinan tinggi. Contoh: Alokasikan 30% belanja modal untuk pembangunan jalan perdesaan dengan sistem *cash for work* melibatkan masyarakat miskin. Penguatan monitoring dan evaluasi (MONEV) proyek modal tindakan konkret: bentuk tim independen (melibatkan akademisi/LSM) untuk mengevaluasi efektivitas belanja modal setiap tahun, khususnya pada proyek dengan anggaran besar. Gunakan indikator: jumlah lapangan kerja tercipta, peningkatan akses ekonomi, dan penurunan kemiskinan di lokasi proyek.
3. Penguatan sektor unggulan yang kontributif terhadap PDRB. Tindakan konkret: Identifikasi 3 sektor dengan kontribusi tertinggi ke PDRB (misal: pertanian, perdagangan, jasa) melalui analisis data BPS, lalu berikan insentif khusus Pertanian Bangun *cold storage* dan pasar digital untuk komoditas unggulan (jagung, ternak). Perdagangan: Fasilitasi pelatihan e-commerce bagi UMKM lokal. Jasa: Kembangkan pariwisata berbasis budaya lokal (contoh: paket wisata agrowisata). Pinvestasi melalui kemudahan perizinan berusaha. Bentuk *one-stop service* untuk perizinan usaha dengan target, Pemrosesan izin UMKM maksimal 3 hari, Sosialisasi skema insentif pajak bagi investor di sektor pariwisata dan pertanian.

Implementasi dan pengukuran keberhasilan Pelaksana: Dinas Perindustrian, Dinas Pertanian, Bappeda, dan Koperasi/UMKM. Peningkatan pertumbuhan PDRB minimal 4% pada 2026. Penurunan ketimpangan antarsektor (standar deviasi kontribusi sektor $<1,5\%$)

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Pengembangan penelitian ini disarankan untuk mengganti atau menambahkan variabel yang dapat mempengaruhi kemiskinan. Variabel baru yang bisa ditambahkan seperti pengangguran, indeks pembangunan manusia, kualitas pendidikan dan kesehatan, upah minimum daerah, dan ketahanan pangan. Peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan faktor kebijakan pemerintah saat itu dengan variabel yang diteliti.